

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Wisma Altet merupakan satu dari sekian banyak kasus korupsi di tanah air yang paling mendapat perhatian dari masyarakat menjelang SEA GAMES XXVI 2011 lalu. Pasalnya, kasus ini mulai mengemuka ketika pembangunan gedung wisma atlet di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang sedang dalam tahap pengerjaan. Adapun kabarnya, pembangunan gedung wisma atlet sebagai tempat menginap para atlet dari berbagai Negara peserta SEA GAMES diusulkan oleh Menteri Olahraga dan Pemuda, Andy Mallarangeng. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Litbang *Kompas*, kasus suap Wisma Atlet menempati urutan pertama dalam deretan 10 Isu Terbesar pada tahun 2011 (Erianto, 2012: xvi).

Berdasarkan penelitian Litbang *Kompas*, kasus korupsi yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat ini menjadi topik terpopuler mengalahkan isu-isu besar lain yang diangkat media massa sepanjang tahun 2011 (Erianto, 2012: xvii). Adapun pembangunan Wisma Altet ini sejak awal diduga dilakukan oleh banyak pihak. Sebut saja nama-nama yang terlibat di dalamnya seperti Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrun, Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mindo Rosalina Manulang dan sejumlah oknum pejabat lainnya. Kasus ini juga melibatkan PT. Duta Graha Indah, Tbk

sebagai pemenang tender pembangunan wisma atlet yang diduga kuat merupakan permainan politik.

Maraknya kasus korupsi Wisma Atlet yang menyeret sejumlah nama dalam Partai Demokrat menjadi alasan lain kasusnya ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk di media. Terlebih ketika media mempublikasikan berita larinya Muhammad Nazaruddin dan penangkapannya di Kolombia serta terungkapnya nama baru seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andy Mallarangeng dan sejumlah nama lainnya yang tersangkut kasus ini.

Dalam kasus ini, media memainkan perannya dalam usaha memberitakan dan memberi informasi kasus korupsi ini. Banyak media yang tak jarang menempatkan berita seputar kasus korupsi Wisma Atlet sebagai berita utama di halaman depan (*headline news*). Hal ini setidaknya menunjukkan perhatian media terhadap kasus Wisma Atlet. Di lain pihak, kuatnya nilai berita yang terkandung dalam isu ini menjadi alasan lain media seringkali memberikan perhatian khusus dalam pemberitaannya karena kasus ini diduga melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat, parpol pemenang pemilu 2009 (Erianto, 2012: xvii). Namun tak jarang pula isu korupsi Wisma Atlet ini digunakan oleh media sebagai senjata untuk menaikkan pamor atau menurunkan pamor partai politik tertentu.

Media Indonesia sebagai salah satu media dengan kemungkinan memberi dampak sosial dan politik kepada masyarakat juga turut memberi perhatian atas isu yang berskala nasional ini. Di sini, *Media Indonesia* juga bisa dikatakan ikut mendorong agar praktik pemerintahan dan penggunaan dana publik menjadi

transparan (Tim LSPP, 2005: 2). Hal ini terlihat dari pemberitaannya yang berkesinambungan sejak mengemukanya kasus Wisma Atlet.

Di samping itu, alasan pemilihan *Media Indonesia* juga didasarkan pada beberapa hal lainnya, di antaranya (1) *Media Indonesia* adalah surat kabar dengan jangkauan nasional karena tersebar di 33 provinsi dan 429 kabupaten/kotamadya di Indonesia, (2) *Media Indonesia* sebagai salah satu perusahaan media milik Surya Paloh (Nugroho, 2012: 17) dengan demikian memiliki afiliasi politik dengan Partai Nasional Demokrat yang belum lama ini terbentuk, dan (3) karena afiliasi politik dengan Partai Nasional Demokrat itulah *Media Indonesia* cenderung selalu mengkritik pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu-isu nasional di Indonesia seperti halnya korupsi Wisma Atlet.

Alasan afiliasi atau hubungan kedekatan *Media Indonesia* dengan Surya Paloh bersama partai yang dibentuknya itu dapat pula dilihat dari berita-berita yang lebih berpihak terhadap keberlangsungan Partai Nasional Demokrat. Alasan afiliasi ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi. Tim ISAI menemukan bahwa pada masa kampanye dan pemilu presiden-wakil presiden 2009 silam, *Media Indonesia* yang terafiliasi dengan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto cenderung lebih banyak memberitakan pasangan tersebut. Terhitung ada sebanyak 36 berita yang dimuat *Media Indonesia* tentang pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Sedangkan untuk pasangan Yudhoyono-Budiono dan Megawati-Prabowo, *Media Indonesia* masing-masing memuat berita sebanyak 25 berita dan 24 berita. Dari 25 berita tentang pasangan Yudhoyono-

Budiono, 8 berita di antaranya bernada negatif (Saptono, 2009: 36). Hasil penelitian TIM ISAI juga menunjukkan SKH *Media Indonesia* cenderung memberitakan lebih banyak berita bernada negatif terhadap calon pasangan Yudhoyono-Budiono dibandingkan kepada pasangan Megawati dan tentunya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (Saptono, 2009: 5).

Hasil penelitian Tim ISAI di atas tentu menjadi gambaran yang dapat menunjukkan bagaimana *media performance* yang dimiliki oleh SKH *Media Indonesia*. Secara sederhana, berdasarkan hasil penelitian TIM ISAI tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa *media performance* yang dimiliki oleh SKH *Media Indonesia* terutama untuk penekanan aspek keberimbangan pemberitaan (*balance*) masih dipengaruhi oleh keberpihakan terhadap pihak-pihak atau aktor-aktor tertentu. Jika dilihat, hasil penelitian TIM ISAI menemukan bahwa SKH *Media Indonesia* masih mengusung keberpihakan terhadap kader yang pada masa pemilu tahun 2009 memiliki hubungan kedekatan secara politis dengan SKH *Media Indonesia* sendiri. Dalam hal ini yang peneliti maksudkan adalah hubungan politis yang dimiliki oleh Surya Paloh sebagai pemilik SKH *Media Indonesia* yang pada saat itu masih menempati jabatan sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar.

Bagi peneliti, hasil penelitian tentang *media performance* dalam hal ini keberimbangan pemberitaan SKH *Media Indonesia* yang ditemukan oleh TIM ISAI memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Alasannya, penelitian yang dilakukan peneliti juga berfokus pada keberimbangan pemberitaan (*balance*) meski dalam konteks penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini,

peneliti berfokus pada keberimbangan pemberitaan korupsi, khususnya pada kasus korupsi Wisma Atlet.

Hal tersebut di atas menjadi alasan utama peneliti kemudian memutuskan *Media Indonesia* sebagai objek penelitian. Namun di sisi lain, untuk kepentingan penelitian peneliti juga mempertimbangkan aspek pemberitaan dalam teks berita itu sendiri. Untuk mendukung pertimbangan tersebut, peneliti mencoba melihat fenomena pemberitaan *Media Indonesia* yang sudah ada. Fenomena pemberitaan tersebut peneliti gunakan untuk melihat bagaimana *Media Indonesia* memberitakan isu korupsi Wisma Atlet, yaitu apakah pemberitaan *Media Indonesia* ini berimbang atau tidak dalam pemberitaannya. Menariknya, pada edisi Februari 2012 peneliti menemukan satu berita yang peneliti sinyalir tidak memenuhi unsur keberimbangan dalam pemberitaan tersebut.

Berita tersebut di atas dimuat pada *Media Indonesia* edisi Sabtu, 3 Februari 2012 dalam kolom *headline* yang berjudul : “Internal Demokrat Desak Anas Mundur”. Pada berita tersebut dibahas beberapa hal yang berusaha memaparkan isu keretakan yang terjadi dalam kubu partai Demokrat setelah nama Anas Urbaningrum santer terdengar dalam persidangan Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis.

Beberapa fakta yang peneliti temukan adalah: (1) alinea pertama dipenuhi penilaian subjektif wartawan *Media Indonesia* dalam menanggapi pernyataan sahabat separtai Anas Urbaningrum, yaitu Ruhut Sitompul. Dalam alinea tersebut:

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mulai ditinggalkan oleh orang dekatnya. Ruhut Sitompul yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas justru mendesaknya mundur dari jabatan ketua umum (Fardiansah, 2012:1)

Pemilihan frasa seperti “*ditinggalkan oleh orang dekatnya*” menunjukkan bahwa internal Partai Demokrat dalam keadaan yang tidak lagi utuh. Tidak hanya itu, pemilihan diksi yang berani seperti “*Ruhut Sitompul yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas justru mendesaknya mundur*”, turut menguatkan isu keretakan bahwa orang-orang dalam internal Partai Demokrat tidak lagi memiliki pemahaman yang sama.

Fakta (2) narasumber yang dimintai keterangan sama sekali tidak merepresentasikan adanya keberimbangan berkaitan dengan *stakeholder* yang diberitakan. Dalam hal ini, yang peneliti maksudkan dengan *stakeholder* dalam berita adalah Anas Urbaningrum sebagai pihak yang ditonjolkan dalam berita serta orang-orang yang termasuk dalam internal Partai Demokrat. Dalam berita tersebut hanya ditampilkan narasumber dari pihak internal Partai Demokrat seperti Ruhut Sitompul, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto.

Fakta (3) tidak adanya konfirmasi terkait tanggapan Anas Urbaningrum terhadap kebenaran isu yang beredar serta desakan internal Partai Demokrat yang ditujukan kepadanya.

Penemuan di atas ini pada akhirnya menjadi panduan dan batu loncatan bagi peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana *Media Indonesia* memberitakan korupsi Wisma Atlet. Adapun hasil penelitian ini akan menunjukkan ada atau tidaknya unsur keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan kecenderungan pemberitaan seperti apa yang ditampilkan *Media Indonesia* dalam hal pemberian

porsi yang sama bagi pendapat pro dan pendapat yang kontra terhadap korupsi Wisma Atlet.

Adapun sebagai referensi untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh tim LSPP pada tahun 2005 yang meneliti bagaimana media lokal di 4 wilayah di Indonesia: Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat memberitakan kasus-kasus korupsi dan pelayanan publik di masing-masing wilayah tersebut. Pemilihan lokasi penelitian oleh Tim LSPP didasarkan pada pandangan bahwa keempat wilayah tersebut mewakili wilayah-wilayah yang menunjukkan tingkat prevalensi korupsi yang cukup tinggi dan menengah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk memberikan kerangka umum terhadap penelitian, deskripsi wilayah penelitian, deskripsi media-media yang ada di masing-masing wilayah dan identifikasi bagaimana media-media lokal tersebut menjalankan fungsinya. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menunjukkan kecenderungan pemberitaan di masing-masing wilayah. Hasil penelitiannya menunjukkan performa pemberitaan yang ditunjukkan media lokal dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal serta kelebihan dan kekurangan media dalam menjalankan fungsi pengawalan terhadap proses demokrasi (Tim LSPP, 2005: 10-12).

Penelitian kedua yang dijadikan referensi adalah penelitian skripsi mengenai Keberpihakan Pers dalam Pemberitaan mengenai Pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam di Republika dan Kompas. Dalam penelitian ini,

penelitinya menggunakan jenis penelitian analisis isi kuantitatif untuk melihat arah keberpihakan pers Republika dan Kompas dalam pemberitaannya mengenai pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam (Lina, 2012: 9). Penelitian ini digunakan sebagai referensi karena kerangka teori serta jenis penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan teori objektivitas oleh Westersthal dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Referensi terakhir yang menjadi basis penelitian ini adalah penelitian skripsi tentang Pemberitaan Penangkapan Nazaruddin terkait Kasus Suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis *framing* untuk melihat bagaimana Tempo membingkai berita penangkapan Muhammad Nazaruddin terkait kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Penelitian tersebut sampai pada kesimpulan bahwa Tempo membangun sosok Nazaruddin sebagai seorang yang licik. Di samping itu, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa Tempo menyosokkan KPK sebagai lembaga yang kurang tegas dalam penyelesaian kasus tersebut. Pada akhir kesimpulan tersebut dipaparkan bahwa dalam pembingkaiian penangkapan Nazaruddin, Tempo memberitakan kasus tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Dewi, 2012: 127).

Berkaitan dengan isu korupsi Wisma Atlet untuk kepentingan penelitian tentang Keberimbangan Pemberitaan Korupsi di Media Cetak ini, peneliti memiliki pandangan bahwa kasus korupsi Wisma Altet sangat menarik untuk diteliti. Alasannya, (1) kasus ini merupakan kasus dengan isu terbesar dan paling banyak mendapat perhatian di samping kasus Bank Century pada masa

pemerintahan SBY; (2) kasus korupsi ini merupakan kasus korupsi berjangkaran yang banyak melibatkan petinggi partai politik dan wakil rakyat; dan (3) kasus korupsi ini banyak menyeret sejumlah nama yang notabene berada di bawah naungan partai politik SBY.

B. Rumusan Masalah

Adakah keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* pada periode Agustus 2011, Februari 2012 hingga Maret 2012?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ada tidaknya keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* pada periode Agustus 2011, Februari 2012 hingga Maret 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberi sumbangan untuk pengembangan ilmu komunikasi khususnya tentang pemberitaan korupsi di media massa.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian sejenis di waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan bagi ilmu komunikasi dalam penerapannya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana media massa memberitakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Teori

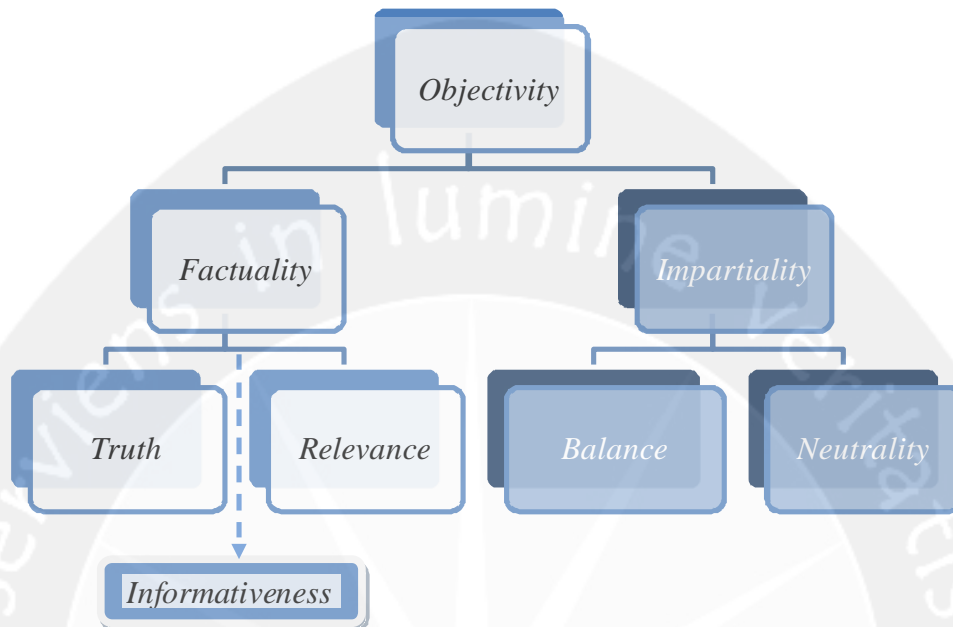
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menampilkan beberapa kerangka teori yang menjadi dasar bagi penelitian. Beberapa kerangka teori yang peneliti maksud mengacu pada teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain berkaitan dengan objektivitas dalam media massa serta teori keberimbangan yang menjadi bagian dari objektivitas itu sendiri. Berikut ini rincian teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Objektivitas

Ada banyak kriteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. Satu di antara kriteria tersebut adalah kriteria yang dikemukakan oleh Westerstahl (Nurudin, 2009: 81). Dalam bukunya yang berjudul *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (1992), Denis McQuail menjabarkan secara rinci kerangka objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl.

Dalam bagan tersebut, Westerstahl membagi objektivitas ke dalam dua kriteria, yaitu faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). Sementara itu, imparsialitas hanya bisa ditegakkan jika didukung oleh keseimbangan (*balance*) dan *neutrality* atau netralitas (Nurudin, 2009: 82). Adapun skema objektivitas menurut Westerstahl dapat digambarkan sebagai berikut:

BAGAN 1
Skema Objektivitas Westerstahl



Sumber: Denis McQuail, 1992:196

Untuk melengkapi kerangka teori berdasarkan skema objektivitas Westerstahl, berikut ini dipaparkan secara rinci bagian-bagian penting di dalamnya:

1.1 Aspek Kognitif (Kualitas Informasi)

Kualitas informasi yang dimaksudkan Westerstahl sebagai bagian tak terpisahkan dari faktualitas dapat ditelusuri dua aspek penting yaitu *truth* atau kebenaran dan *relevance* atau relevansi. Konsep *truth* atau kebenaran menurut Westerstahl sangat berkaitan dengan beberapa aspek kualitas informasi yang berhubungan dengan *reliability* (reliabilitas) dan *credibility* (kredibilitas) sejumlah fakta yang ditampilkan dalam berita. Dari aspek ini, dapat ditarik beberapa aspek lainnya yang bisa diukur seperti aspek *factualness* (aspek kebaruan), aspek

accuracy (aspek keakuratan) dan aspek *completeness* atau aspek kelengkapan (McQuail, 1992: 197).

Adapun selain faktualitas, kualitas informasi yang dimaksudkan Westerstahl juga merujuk pada aspek *relevance* (relevansi). Aspek ini seringkali digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas dari proses *news selection* (seleksi berita). Proses ini merupakan standar yang dapat diterapkan pada setiap level yang berbeda dalam melihat isi media seperti subjek umum, pilihan topik (internasional atau lokal, kriminal atau berita-berita politik), level peristiwa dan sebagainya (McQuail, 1992: 198).

Dalam dunia jurnalistik, kriteria relevansi dapat dilihat dari proses *news selection* (seleksi berita) mulai dari masalah waktu (*timeliness*), topik berita (*topicality*) dan aspek nilai berita lainnya dari suatu peristiwa yang terjadi. Selain itu, dalam suatu peristiwa yang hendak dijadikan berita biasanya juga dipertimbangkan aspek *closeness* (kedekatan) dan aspek *scale* atau besarnya skala suatu berita (McQuail, 1992: 200).

1.2 Aspek Evaluatif (Imparsialitas)

Elemen kedua dari konsep objektivitas sebagaimana diidentifikasi oleh Westerstahl adalah imparsialitas. Imparsialitas ini dapat ditelusuri dari sejauh mana aspek *balance* (keberimbangan) dan aspek *neutrality* (netralitas) tercapai (McQuail, 1992: 200).

Aspek *balance* (keberimbangan) merujuk pada masalah seleksi fakta yang berkaitan dengan cara pandang nilai dan ekspresi yang ditunjukkan oleh partai-partai sebagai fakta. Adapun pemberitaan yang berimbang dapat dilihat dengan

berbagai cara yang terutama tergantung pada jumlah, relevansi dan status partai yang terlibat dalam suatu isu atau peristiwa (McQuail, 1992: 201).

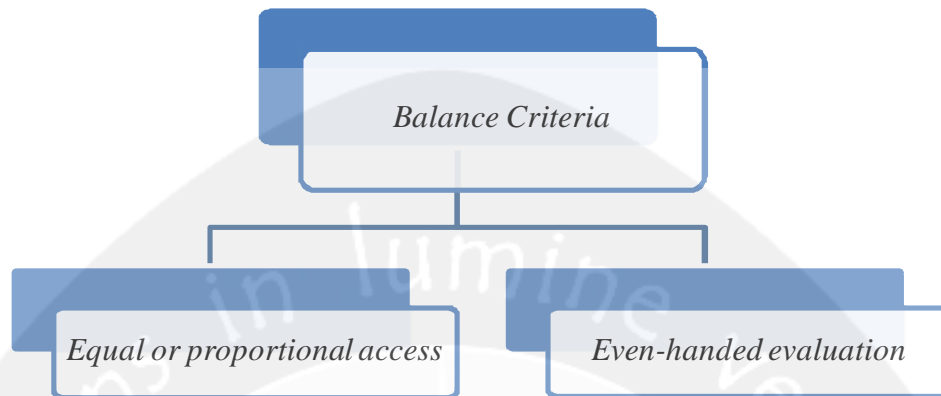
Sedangkan aspek netralitas dapat dilihat pada penggunaan kata-kata, gambar, dan kerangka berpikir. Selain itu, dalam melihat aspek netralitas suatu berita akan lebih difokuskan pada bagaimana aspek konotasi dinilai lebih penting daripada aspek denotasi (McQuail, 1992: 201).

2. Keberimbangan

Pada dasarnya, konsep keberimbangan (*balance*) dapat ditemukan dalam skema objektivitas seperti yang dikemukakan oleh Westerstahl. Berdasarkan bagan tersebut, Denis McQuail (1992: 203) mencoba merincikan aspek keberimbangan (*balance*) dalam skema sederhana.

Skema tersebut digunakan McQuail untuk menunjukkan kriteria-kriteria yang dapat digunakan dalam melihat keberimbangan suatu pemberitaan oleh media. Adapun kriteria dari sebuah keberimbangan dalam pemberitaan baru akan tercapai jika memenuhi aspek *cover both side* atau dalam bagan di atas disebut sebagai aspek *equal or proportional access*. Artinya, dalam pemberitaan harus ada cek dan ricek. Tidak hanya itu, keberimbangan pemberitaan sebuah media juga sangat ditentukan oleh aspek evaluasi sisi positif dan negatif (*even-handed evaluation*). Skema sederhana yang digunakan McQuail dapat ditunjukkan pada bagan di bawah ini:

BAGAN 2 Skema Keberimbangan



Sumber: Denis McQuail, 1992: 203

Dalam penelitian ini, bagan di atas menjadi penting karena menjadi landasan utama untuk melihat aspek keberimbangan dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet. Adapun aspek *balance* sendiri diukur dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak (Rahayu, 2006: 27). Menurut Rahayu (2006: 22), *balance* bisa diukur berdasarkan tiga elemen seperti di bawah ini:

Pertama, ada atau tidak adanya *source bias* atau penampilan satu sisi dalam pemberitaan. Aspek ini dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan. Dalam menyajikan fakta, media harus menampilkan berbagai sumber yang relevan, baik yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra).

Kedua, ada atau tidaknya *slant* yaitu kecenderungan media (wartawan, editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian dapat dilihat sebagai bentuk kecondongan media terhadap nilai-nilai tertentu.

Ketiga, *balance* diukur berdasarkan ada atau tidaknya bentuk-bentuk ketidakseimbangan pemberitaan. Dalam penelitian ini ketidakseimbangan pemberitaan akan dilihat dari keseimbangan jumlah porsi alinea yang merepresentasikan pendapat pro dan kontra.

F. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka definisi kerangka konsep yang muncul dalam penelitian ini adalah konsep tentang *balance* atau keberimbangan.

1. Pemberitaan

Pemberitaan surat kabar yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan majalah. Adapun pemberitaan hanya dibatasi pada berita *straightnews* atau berita langsung yang dimuat *Media Indonesia*. Alasan pemilihan berita-berita *straightnews* karena lebih menekankan pada aktualitas berita dibandingkan dengan *feature* yang bisa mengabaikan faktor ini.

2. Keberimbangan berita

Keberimbangan berita ialah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (*omission*) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (Eriyanto, 2011: 195). Konsep ini membantu peneliti dalam bagaimana media menampilkan berita yang berimbang, tidak memihak, tidak berat sebelah dan selalu *cover both side*. Lewat pengujian aspek keberimbangan ini, nantinya dapat dilihat ada tidaknya aspek keberimbangan dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet pada SKH *Media Indonesia*.

G. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap teks-teks berita yang menjadi objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan melihat sejauh mana unit analisis terepresentasi dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet.

TABEL 1
Unit Analisis dan Kategori Penelitian
Berdasarkan Kerangka Westerstahl

Dimensi	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategori
<i>Balance</i>	<i>Source Bias</i>	Penampilan jumlah sisi dalam pemberitaan	a. Satu sisi
			b. Dua sisi
	<i>Slant</i>	Penilaian positif	a. Ada
			b. Tidak ada
		Pemberian pujian	a. Ada
			b. Tidak ada
	Penilaian negatif	a. Ada	
		b. Tidak ada	
	Pemberian kritik	a. Ada	
		b. Tidak ada	
Representasi Pro - Kontra	Kesamaan jumlah porsi yang diberikan kepada sumber berita	a. Sama	
		b. Tidak sama	

H. Definisi Operasional

Kerangka unit analisis dan kategorisasi di atas pada dasarnya merupakan acuan dalam penelitian ini. Unit analisis dan kategorisasi tersebut sangat membantu peneliti dalam melakukan penilaian tentang keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH Media Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat adakah dimensi keberimbangan dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet pada SKH Media Indonesia. Keberimbangan itu sendiri menurut Denis McQuail (Rahayu, 2006:

27) diukur dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak. Dengan demikian, untuk mengetahui ada tidaknya dimensi keberimbangan dalam pemberitaan tersebut, peneliti menggunakan alat ukur sebagai berikut:

1. Source bias

Untuk mengetahui ada atau tidaknya *source bias* dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet pada SKH *Media Indonesia*, penelitian dilakukan dengan melihat sisi peliputan yang digunakan oleh wartawan melalui teks berita tersebut. Sisi peliputan ini dibagi dalam kategori seperti sisi peliputan yang hanya melibatkan satu sisi dan dua sisi. Dalam hal ini, *source bias* bisa saja terjadi jika wartawan hanya menggali informasi hanya dari narasumber-narasumber yang memiliki pandangan yang sama. Tidak hanya itu, aspek *cover both side* sangat pula diperhitungkan dalam melihat ada atau tidaknya *source bias*.

Kategori satu sisi dapat didefinisikan bilamana wartawan hanya mengumpulkan informasi dan fakta dari narasumber serta rujukan yang memiliki pandangan yang sama ataupun memperkuat pandangan yang sudah ada. Rujukan dapat juga dipahami sebagai perseorangan, data dari lembaga survei, dokumen serta sumber yang tak tak ingin namanya disebutkan (*blind source*).

Kategori dua sisi dapat didefinisikan bilamana wartawan mengumpulkan informasi dan fakta dari narasumber atau rujukan yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya, wartawan Indonesia tidak hanya memuat satu sisi pandangan dalam berita tetapi juga memuat pandangan dari pihak yang berseberangan. Aspek *cover both side* dalam kategori nantinya dapat dilihat.

Sebagai contoh, peneliti melakukan penelitian terhadap satu berita sampel berita dalam penelitian ini yang dipublikasikan pada 3 Februari 2012. Berita tersebut diberi judul “Internal Demokrat Desak Anas Mundur”. Dalam berita tersebut setidaknya ada empat narasumber yang informasi dan keterangannya digunakan oleh wartawan *Media Indonesia*. Pernyataan tiga narasumber yang pernyataannya dikutip secara tidak langsung adalah Ruhut Sitompul, Abraham Samad dan Max Sopacua selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Sedangkan satu pernyataan lainnya yang dikutip secara langsung adalah dan pernyataan Dani Sriyanto selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

Berdasarkan jumlah keberagaman narasumber di atas, peneliti tidak serta-merta menggolongkan tipe peliputan yang digunakan oleh *Media Indonesia* dalam berita ini menggunakan tipe peliputan multisisi. Pertama-tama, peneliti akan melihat apakah keberagaman narasumber di atas juga menampilkan keberagaman pandangan. Artinya, *Media Indonesia* menampilkan banyak narasumber didukung dengan pandangan berbeda dari masing-masing narasumber.

Namun demikian, peneliti menemukan bahwa dalam peliputan tersebut *Media Indonesia* hanya melakukan konfirmasi atau kegiatan cek dan ricek terhadap narasumber yang memiliki pandangan yang sama. Dalam hal ini, dalam menanggapi pernyataan Ruhut Sitompul yang mendesak agar Anas Urbaningrum mundur dari jabarannya, *Media Indonesia* hanya melakukan konfirmasi terhadap pihak yang setuju dengan pernyataan Ruhut yaitu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dan Sekretaris DPD Parta Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto.

Peneliti menilai, *Media Indonesia* mengabaikan peran Anas Urbaningrum dalam hal ini. Seharusnya *Media Indonesia* memiliki kewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Anas Urbaningrum yang dalam hal ini menjadi *stakeholder* utama dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian dalam berita ini, peneliti menyimpulkan bahwa tipe peliputan yang digunakan oleh wartawan *Media Indonesia* adalah tipe peliputan satu sisi, yaitu hanya menampilkan narasumber-narasumber yang memiliki pandangan yang sama.

2. *Slant*

Slant dapat dilihat dari ada atau tidaknya kecenderungan media dalam hal ini wartawan ataupun editor *Media Indonesia* dalam menyampaikan penilaian positif, pujian, penilaian negatif serta kritik atas suatu peristiwa yang berkaitan dengan korupsi Wisma Atlet dan bukannya dari narasumber. Dalam hal ini, penilaian positif adalah usaha wartawan dalam memberikan apresiasi positif atas kinerja, kasus, ataupun orang yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet. Pujian adalah usaha media dalam hal ini wartawan dalam memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat memuji terhadap misalnya kinerja, penanganan kasus, ataupun orang yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet dan sebagainya.

Penilaian negatif adalah usaha wartawan dalam memberikan nilai atas kinerja, kasus, ataupun orang yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet yang bisa jadi tidak bagus, tidak terkontrol ataupun hal-hal yang bersifat merugikan orang lain. Sedangkan kritik adalah usaha wartawan dalam memberikan tanggapan yang biasanya disertai dengan pertimbangan baik atau buruk terhadap misalnya atas

kinerja, penanganan kasus, kasus itu sendiri ataupun orang yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet.

Dalam salah satu sampel berita untuk penelitian ini, yaitu berita yang dipublikasikan *Media Indonesia* pada edisi 24 Februari 2012 dengan judul “Demokrat Galau”, peneliti menemukan penilaian negatif dalam paragraf berikut ini:

Ironisnya, buruk rupa partai malah televisi dibelah. Fungsionaris Demokrat Ferry Juliantono kemarin mengadukan dua televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia. Pemberitaan tak berimbang dua televisi itu dituding telah membuat citra partainya turun. Langkah Ferry disesalkan Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Menurut dia, DPP belum pernah membicarakan pengaduan terhadap media massa (Bhawono, 2012: 1)

Menurut peneliti, pemilihan frasa wartawan *Media Indonesia* yang tersurat seperti *Ironisnya, buruk rupa partai malah televisi dibelah* merupakan suatu penilaian negatif. Wartawan *Media Indonesia* secara terang-terangan menyampaikan penilaian negatif atas reaksi yang ditunjukkan oleh Fungsionaris Demokrat, Ferry Juliantono terkait pelaporannya terhadap kedua televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia. Peneliti melihat bahwa reaksi yang ditunjukkan oleh kader Partai Demokrat ini dianggap wartawan *Media Indonesia* sebagai reaksi yang ironis. Hal ini jelas terungkap dalam frasa yang dipakai yaitu *buruk rupa partai malah televisi dibelah*.

3. Representasi Pro–Kontra

Dalam penelitian ini, representasi pro–kontra dapat dilihat melalui adanya kesamaan porsi alinea yang diberikan oleh *Media Indonesia* terhadap pihak yang memiliki pandangan pro dan pihak yang memiliki pandangan kontra serta aktor–aktor yang terlibat dalam korupsi Wisma Atlet. Hal ini sangat

membantu peneliti dalam menyimpulkan arah pemberitaan serta politik yang dianut oleh SKH *Media Indonesia*.

Kesamaan porsi yang peneliti maksud dapat dilihat dari indikator banyaknya jumlah porsi alinea yang diberikan oleh *Media Indonesia* kepada *stakeholder* dalam berita. Indikator tersebut adalah:

(a) Sama. Porsi alinea dikatakan sama jika jumlah porsi yang diberikan wartawan relatif sama. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kesamaan alinea yang diakomodasikan bagi pihak yang memiliki pandangan pro maupun pihak yang memiliki pandangan kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti menetapkan ukuran kesamaan porsi berdasarkan ukuran jumlah alinea yang diakomodasikan untuk kedua pihak, yaitu (1:1, 2:2, 3:3, dan seterusnya). Selain itu, suatu berita bisa dikatakan memberikan porsi yang sama jika perbedaan banyaknya jumlah porsi alinea minimal berbanding 1:2.

(b) Tidak sama. Porsi alinea dikatakan tidak sama jika jumlah porsi yang diberikan wartawan relatif tidak sama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah perbedaan alinea yang diakomodasikan bagi pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti menetapkan ukuran jumlah perbedaan porsi yang mencapai 3-4 alinea bagi pihak yang pro maupun pihak yang kontra dalam pemberitaan.

Sebagai contoh, peneliti menghadirkan satu temuan berita yang menurut peneliti tidak memenuhi unsur kesamaan representasi kelompok pro-kontra.

Berita yang peneliti maksud adalah berita yang dipublikasikan pada tanggal 3 Februari 2012 dengan judul “Internal Demokrat Desak Anas Mundur”.

Dalam berita tersebut, ada beberapa narasumber yang dihadirkan yaitu (1) Ruhut Sitompul. Pernyataan Ruhut Sitompul dikutip secara tidak langsung. Adapun inti pernyataan Ruhut ditemukan dalam berita alinea keempat:

Menurut Ruhut, Anas didesak mundur demi menyelamatkan partai dari dampak serangan terkait dengan kasus korupsi yang didakwakan Muhammad Nazaruddin, Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (Fardiansah, 2012: 1).

Narasumber (2) Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. Pernyataan Max Sopacua dikutip tidak langsung dalam berita yang terlihat pada alinea keenam dalam berita:

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai desakan Ruhut agar Anas mundur sebagai seruan hati. Ia mengakui suara seperti itu tidak hanya didengarkan di Jakarta, tapi juga dari daerah-daerah (Fardiansah, 2012: 1).

Narasumber (3) Sekretaris DPD Partai Demokrat, Dani Sriyanto yang memberi salah pernyataan sebagai berikut:

Dari hasil sejumlah survey, tingkat kepercayaan terhadap Demokrat mulai menurun belakangan ini (Fardiansah, 2012: 1).

Tidak hanya itu, pernyataan Dani Sriyanto yang dikutip secara tidak langsung dapat pula dilihat dalam alinea kesembilan dalam berita:

Dani mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak. Jika bukti keterlibatan Anas kuat, Dani minta KPK jangan melakukan pembiaran (Fardiansah, 2012: 1).

Narasumber (4) adalah Abraham Samad yang keterangannya ditampilkan dalam bentuk kutipan yang tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada alinea

kesepuluh dalam berita yang dikutip saat Abraham Samad memberi pernyataan kepada Pejuang '45:

Ketua KPK Abraham Samad hanya berjanji bakal ada perkembangan menarik soal kasus tersebut. Dia akan mengungkapkan perkembangan menarik itu dalam jumpa pers pada hari ini (Fardiansah, 2012: 1).

Berdasarkan empat narasumber yang teridentifikasi serta pernyataan-pernyataannya di atas, peneliti menemukan bahwa ada ketidaksamaan porsi yang diberikan oleh *Media Indonesia*. Dalam hal ini, representasi pro dan kontra terhadap informasi dalam berita tidak memiliki jumlah kesamaan porsi alinea. Artinya, *Media Indonesia* lebih banyak menghadirkan narasumber yang bisa dikatakan mendukung adanya isu yang berkembang bahwa benar adanya jika memang telah terjadi keretakan dalam tubuh Partai Demokrat serta adanya desakan bagi mundurnya Anas Urbaningrum dari posisinya dalam partai.

Namun demikian, masih berpijak pada berita di atas dapat dilihat bahwa wartawan *Media Indonesia* tidak mengakomodasikan tempat bagi Anas Urbaningrum untuk memberi pernyataan, tanggapan ataupun konfirmasi. Dari Sembilan alinea yang ada dalam berita, tidak satupun alinea diakomodasikan bagi Anas Urbaningrum. Isi berita tersebut hanya diisi oleh pendapat dari beberapa narasumber yang bisa dikatakan berada dalam satu kubu yang bertentangan dengan Anas Urbaningrum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berita yang "Internal Demokrat Desak Anas Mundur" tidak memenuhi unsur kesamaan porsi bagi pihak yang pro maupun pihak yang kontra dalam pemberitaan.

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif. Analisis isi ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011: 15).

Identifikasi secara sistematis dalam penelitian ini sangat membantu peneliti dalam melihat secara urut hal-hal yang penting dan diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan maksudnya objektif dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penemuan yang apa adanya. Eriyanto (2011: 16) merumuskan penelitian yang objektif sebagai “Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti.”

Adapun analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Analisis isi ini digunakan untuk deskripsi atau penggambaran aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan (Eriyanto, 2011: 47).

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan keberimbangan pemberitaan korupsi di media cetak. Penelitian ini berfokus pada keberimbangan pemberitaan korupsi wisma atlet di SKH *Media Indonesia* selama tiga bulan edisi *Media Indonesia*, yaitu pada periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012.

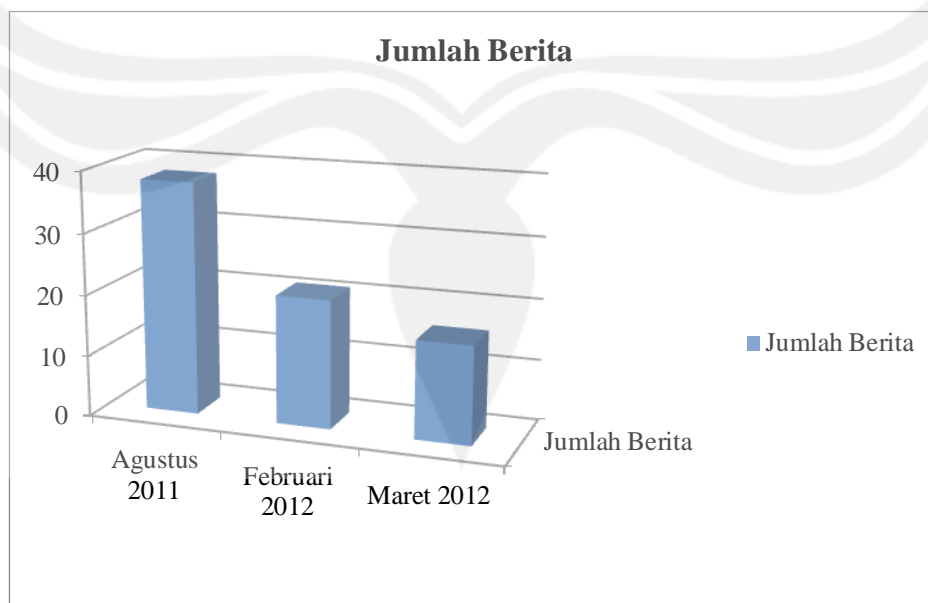
2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita-berita langsung (*hard news*) dalam SKH *Media Indonesia* selama periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 tentang korupsi Wisma Atlet.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua berita tentang korupsi Wisma Atlet selama periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 dengan total 75 artikel berita. Secara keseluruhan, peneliti membuat gambaran keseluruhan populasi dalam grafik. Grafik tersebut menunjukkan tingkat fluktuasi pemberitaan korupsi Wisma Atlet di *Media Indonesia* sesuai dengan *time frame* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adapun grafik populasi berita yang menjadi bahan penelitian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

GRAFIK 1
Fluktuasi Pemberitaan Korupsi Wisma Atlet
di SKH *Media Indonesia*



Selain grafik pemberitaan di atas, peneliti juga menampilkan semua judul berita yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Berikut ini judul berita yang masuk dalam populasi penelitian adalah:

TABEL 2
Judul Berita dalam Populasi Penelitian

No	Edisi	Judul Berita
1	1 Agustus 2011	SBY Enggan Ultimatum Tim Pemburu Nazaruddin
2	2 Agustus 2011	Polri Mengaku masih Buntuti Nazaruddin
3	3 Agustus 2011	Calon Pimpinan KPK Dituding Suap Anas
4	4 Agustus 2011	Rosa Siapkan Dana untuk Kemempora
5	5 Agustus 2011	Komite Etik Pastikan Periksa Pimpinan KPK
6	9 Agustus 2011	Nazaruddin Ditangkap tanpa Pengawal
7	9 Agustus 2011	SBY Minta Kader Ungkap Keterlibatan Kader Demokrat
8	9 Agustus 2011	Wafid Bertemu Angie dan Nazaruddin
9	10 Agustus 2011	Nazaruddin Depresi
10	10 Agustus 2011	SBY Bisa Ganti Anas
11	10 Agustus 2011	Nazaruddin Terancam Dibungkam
12	10 Agustus 2011	Komite Etik Panggil Anas. Saan dan Beny
13	13 Agustus 2011	Tim Gabungan Cegah Suaka Nazaruddin
14	13 Agustus 2011	Istri dan 2 Sahabat Ikut dalam Pesawat
15	14 Agustus 2011	Tangan Nazaruddin Diborgol
16	14 Agustus 2011	Muncul Dugaan Cuci Otak
17	14 Agustus 2011	Verifikasi Informasi dari Nazaruddin
18	15 Agustus 2011	KPK Isolasi Nazaruddin
19	15 Agustus 2011	Neneng bakal Diburu Interpol
20	15 Agustus 2011	Chandra Hamzah Diminta Nonaktif
21	16 Agustus 2011	Nazaruddin Ketakutan Tampak Linglung
22	16 Agustus 2011	Nazaruddin dan Menpora Saling Koordinasi
23	16 Agustus 2011	Beny Akui Pertemuan Nazaruddin-KPK
24	18 Agustus 2011	Nazaruddin Janji tidak Seret Demokrat
25	18 Agustus 2011	Berlebihan, DPR Besuk Nazaruddin
26	19 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Lupa Semuanya
27	22 Agustus 2011	Nazaruddin Sebut Pernah Bertemu Busyro
28	22 Agustus 2011	Nazaruddin Amankan Barang Bukti di Singapura
29	23 Agustus 2011	Nazaruddin Mengaku Terintimidasi di Tahanan
30	23 Agustus 2011	Elsa Syarief Akui Kantongi Surat KPK
31	23 Agustus 2011	Nama Angelina kembali Disebut

32	23 Agustus 2011	Demokrat Bentuk Tim Pencitraan
33	23 Agustus 2011	Surat Balasan Jatuhkan Martabat
34	24 Agustus 2011	Komite Etik Sebut Nazar Mengarang
35	24 Agustus 2011	SBY Sangsikan Pengurus PD
36	26 Agustus 2011	Ada Blackberry di Sel Nazaruddin
37	26 Agustus 2011	Nazaruddin Tuding Pimpinan KPK Takut
38	27 Agustus 2011	Menpora Akui Bertemu Nazar
39	1 Februari 2012	Anas Konsolidasi
40	1 Februari 2012	Demokrat Digerogoti Rayap dan Parasit
41	2 Februari 2012	Nasib Demokrat Terancam Nila Setitik
42	3 Februari 2012	Internal Demokrat Desak Anas Mundur
43	3 Februari 2012	Abraham Samad Janjikan Kejutan
44	6 Februari 2012	SBY Risau, Anas Asyik Berkicau
45	6 Februari 2012	SBY Akui Demokrat Terpuruk
46	7 Februari 2012	Ternyata Anas Belum Aman
47	7 Februari 2012	Angelina Seharusnya juga Dikurung KPK
48	8 Februari 2012	Internal Demokrat Terus Desak Anas Mundur
49	10 Februari 2012	Politik Uang Pintu Pemecatan Anas
50	11 Februari 2012	Politik Uang Di Kongres Demokrat Mulai Diproses
51	11 Februari 2012	F-PD Dorong BK DPR Periksa M Nazir
52	11 Februari 2012	Angie dan Koster akan Dihadapkan dengan Nazaruddin
53	13 Februari 2012	Gara-Gara Nazir, 4 Pejabat Dicotot
54	20 Februari 2012	Anas Akui belum Pecat Angie
55	24 Februari 2012	Demokrat Galau
56	24 Februari 2012	KPK dan Kejaksaaan Bagi-Bagi Kasus Nazaruddin
57	24 Februari 2012	KPK Simpan Nama Menteri Peminta Fee 8%
58	29 Februari 2012	Nazir Cuma Kena Teguran Tertulis
59	29 Februari 2012	Angie -Rosa Diharapkan Jujur Bersaksi
60	1 Maret 2012	Tiga Saksi Nyatakan Anas Urbaningrum Big Boss
61	1 Maret 2012	Angie Diingatkan soal Sanksi Berbohong
62	1 Maret 2012	Giliran Anak Menteri Diseret Nazar
63	2 Maret 2012	KPK Periksa Yulianis di Hotel
64	2 Maret 2012	Majelis Hakim Harus Periksa Anas
65	5 Maret 2012	Saham Milik Nazaruddin belum Dibekukan
66	5 Maret 2012	Anas Dinilai tidak Patuh terhadap Pemerintah SBY
67	6 Maret 2012	JK Sebut Kasus Korupsi Wisma Atlet Struktural
68	7 Maret 2012	Mantan Bawahan Nazaruddin Berbalik Arah
69	7 Maret 2012	Partai Demokrat Represi Media Massa
70	7 Maret 2012	ICW Yakin Kasus Suap Wisma Atlet Struktural

71	8 Maret 2012	Anas Arahkan Penggeledahan KPK
72	8 Maret 2012	Chandra Hamzah Bocorkan Pencekalan Nazaruddin
73	9 Maret 2012	Kasus Hambalang dan Wisma Atlet Naik ke Penyidikan
74	12 Maret 2012	Strategi Ganti Pengacara di Tengah Jalan
75	17 Maret 2012	KPK Pasti Panggil Anas 2 Bulan Lagi

Sumber: Dokumentasi *Media Indonesia*

Berdasarkan populasi di atas, peneliti kemudian memutuskan untuk mengambil banyaknya sampel sesuai dengan banyaknya berita *hardnews* yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dari total 75 pemberitaan pada bulan Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012 diketahui ada 51 berita *hardnews* yang dipublikasikan oleh *Media Indonesia*. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 artikel berita. Alasan pemilihan *hardnews* sebagai sampel dalam penelitian ini lebih didasarkan pertimbangan aktualitas berita. Adapun aktualitas merupakan unsur penting berita langsung (Siregar, 1998: 154).

4. Teknik Sampling

Untuk penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini membantu peneliti dalam mengambil sampel berdasarkan kepentingan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan teks-teks berita yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif. Adapun beberapa bentuk teknik yang peneliti gunakan adalah dokumentasi dan data berdasarkan pengkoder *coding sheet*.

Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data utama yaitu klipring teks berita langsung (*hard news*) tentang pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* selama periode Agustus 2011, Februari 2012 dan Maret 2012. Sedangkan melalui data pengkoder *coding sheet*, peneliti mengumpulkan hasil pengkodean oleh dua pengkoder berdasarkan pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban sesuai unit analisis.

6. Pemilihan *Time Frame*

Pemilihan *time frame* dilakukan peneliti dengan mempertimbangkan fluktuasi pemberitaan yang paling tinggi dan momentum yang terkait dengan tema penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil berita mengenai korupsi Wisma Atlet yang masih menjadi bahan perbincangan saat ini.

7. Uji Reliabilitas Data

Untuk kepentingan uji reliabilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan formula pengukuran reliabilitas yang dikemukakan oleh Holsti. Uji reliabilitas ini sangat membantu peneliti dalam melihat sejauh mana persetujuan dua pengkoder dalam melihat fenomena pemberitaan kasus korupsi Wisma Atlet pada SKH *Media Indonesia*.

Di bawah ini, formula Holsti yang peneliti gunakan untuk mengukur reliabilitas:

$$Uji\ reliabilitas\ antar\ coder = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

M : Jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*)

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh coder 1

N2 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh coder 2

Sumber: Eriyanto, 2011: 290

8. Teknik Analisis Data

Pertama-tama, teknis analisis data untuk kepentingan penelitian ini peneliti lakukan dengan melakukan pengkodean teks berita yang menjadi objek penelitian. Pengkodean ini dilakukan oleh dua pengkoder termasuk peneliti sendiri. Adapun masing-masing pengkoder melakukan pencatatan yang sama berdasarkan batasan yang ada dalam defenisi operasional. Jika semakin tinggi hasil pengkodean, maka dapat dipastikan bahwa semakin reliabel pula hasil yang didapat.

Selanjutnya, hasil pengkodean yang telah diisi melalui lembar *coding sheet* oleh pengkoder peneliti pindahkan dalam tabel yang disusun berdasarkan frekuensi. Tabel ini selanjutnya diketahui sebagai tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tabulasi silang. Tabulasi silang ini adalah tabel yang menghubungkan atau menyajikan dua atau lebih variabel (Eriyanto, 2011:306).

Variabel yang peneliti gunakan dalam tabulasi silang adalah variabel dari unit analisis *source bias* dengan unit analisis representasi pro-kontra, sub unit analisis penilaian positif dengan sub unit analisis penilaian negatif dari unit analisis *slant*, dan sub unit analisis pemberian pujian dengan sub unit analisis pemberian kritik dari unit analisis *slant*. Hasil dari tabulasi silang ini peneliti harapkan dapat menjadi kunci utama untuk melihat bagaimana keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet di SKH *Media Indonesia* periode Agustus 2011, Februari 2012, dan Maret 2012.